



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai



Dinkes sinjai



@dinkes_sinjai

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia_Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2021. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Kesehatan kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal Pemerintahan Kabupaten Sinjai.

Laporan Kinerja ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun Kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Sinjai, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sinjai



dr. Emmy Kartahara Malik., MARS

Pangkat : Pembina

NIP. 19660328 200212 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	3
Bab II Perencanaan Kinerja	6
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	17
Bab IV Penutup	21
Lampiran	23

BAB I. PENDAHULUAN

1. Penjelasan Umum Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 51 tahun 2021 pasal 1 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 25 tahun 2019), Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mempunyai kedudukan:

- 1) Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
- 2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 4) Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
- 6) Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
- 7) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
- 8) Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur

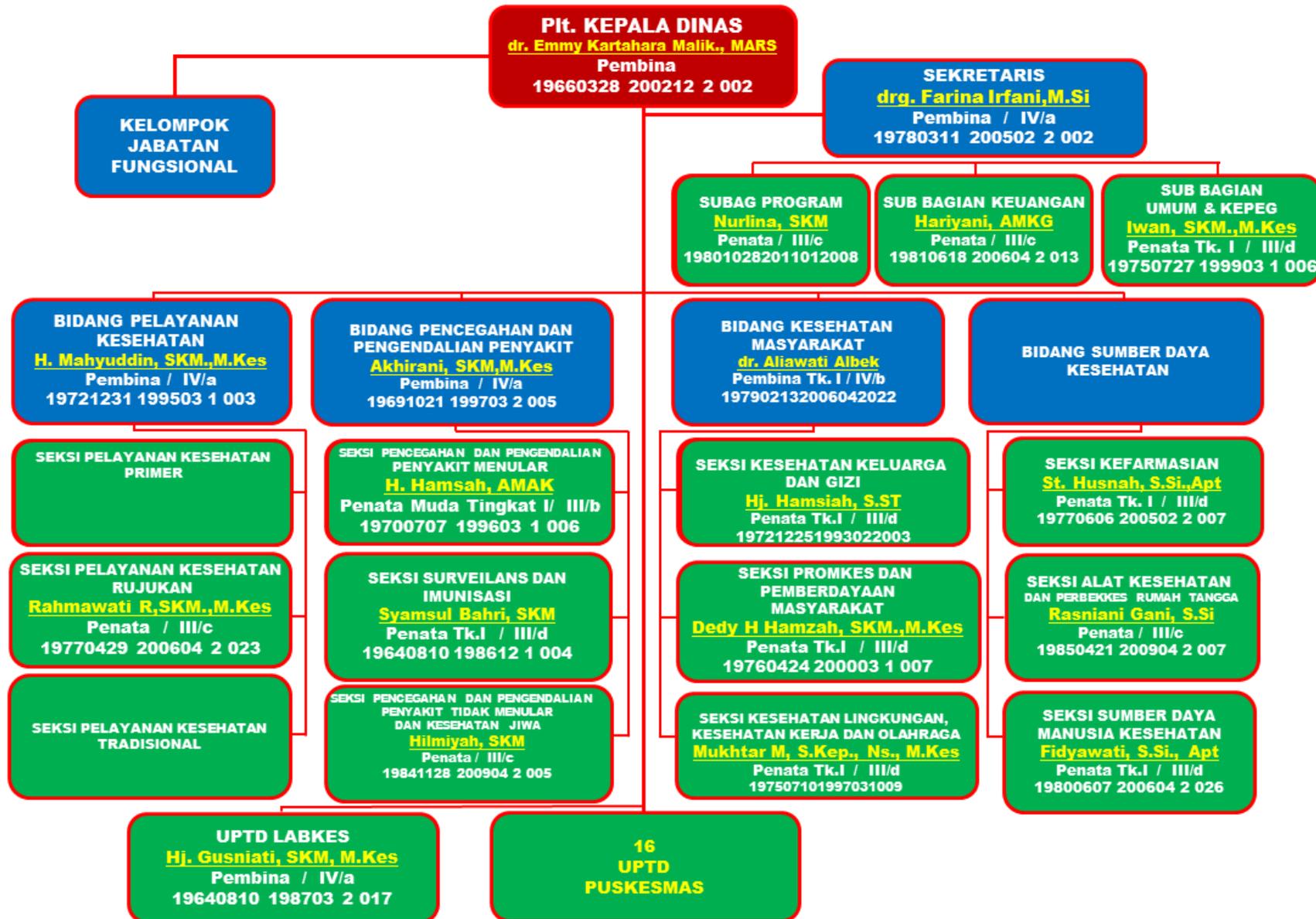
sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
- 11) Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- 12) Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
- 13) Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI



2. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kab. Sinjai, aspek-aspek tersebut antara lain :

A. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2021 termasuk Puskesmas sebanyak 631 Orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tenaga Kesehatan

No	PENDIDIKAN	TAHUN 2021
I	MEDIS	
	1. Dokter Umum	29
	2. Dokter Gigi	17
II	PARAMEDIS	
	1. D3 Bidan	138
	2. D3 Keperawatan	74
	3. Perawat Gigi	21
III	PARAMEDIS NON PERAWAT	
	1. Magister Kesehatan Masyarakat	12
	2. Kesehatan Masyarakat	54
	3. D3 Gizi	19
	4. D3 Analis Kesehatan	8
	5. Apoteker dan Kefarmasian	29
IV	Non Kesehatan /Administrasi/Tata Usaha	
	1. S1 Non Kesehatan	9
	2. D3 Non Kesehatan	4
	3. SLTA	33

B. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Aspek sarana pelayanan kesehatan dalam hal mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kab. Sinjai adalah :

Tabel 1.2

Sarana Pelayanan Kesehatan

No	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UMUM	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Rumah Sakit	0	1
B	Puskesmas dan Jaringannya		
	1. Puskesmas	16	16
	2. Puskesmas Pembantu	62	62
	3. Poskesdes	17	17
	4. Polindes	5	5
	5. Posyandu	344	344
C	Sarana Pelayanan Lain		
	1. Balai Pengobatan/Klinik	3	7
	2. Praktek Dokter Bersama		
	3. Praktek Dokter Perorangan	56	46
	4. Bidan Praktek Swasta	27	8
	5. Perawat Praktek Mandiri	23	5
	6. Fisioteraphy Praktek Mandiri	1	1
D	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian		
	1. Sarana Distribusi Farmasi	1	1
	2. Apotik	24	28
	3. Toko Obat	12	12

Dari table 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sinjai cukup merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu.

C. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jumlah anggaran belanja yang dikelola dapat dilihat pada table 1.2

Tabel 1.2

Alokasi Anggaran Belanja

Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

TAHUN	JENIS BELANJA		TOTAL BELANJA
	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
2020	Rp. 133.377.310.752	Rp. 41.683.198.934	Rp. 175.060.509.686
2021	Rp. 199.945.329.550	Rp. 45.500.381.505	Rp. 245.445.711.055

3. Permasalahan Utama (Strategis Issued)

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan diperoleh gambaran permasalahan Dinas Kesehatan Kab. Sinjai dapat dikelompokkan menjadi:

a. Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah kematian bayi, balita dan ibu melahirkan masih tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
2. Masih tingginya jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang pada bayi dan balita
3. Masih tingginya angka kejadian penyakit infeksi
4. Sistem informasi kesehatan yang belum berjalan optimal
5. Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih rendah

b. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

1. Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas masih Rendah
2. Ketersediaan Obat dan Bahan Medis habis Pakai belum Optimal (Ketersediaan 84%)
3. Ketersediaan Alat Kesehatan berdasarkan Standar Pemenuhan masih Rendah (Ketersediaan 37 % Dari Seharusnya 100%)

c. Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

1. Cakupan desa siaga aktif masih rendah (Indikator PIS-PK dan SPM)
2. Aktualisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat yang masih rendah (ODF)

3. Kurangnya pelibatan sektor non kesehatan dalam pengentasan masalah kesehatan(ADD:Insentif kader,Ambulans desa,BHP Posbindu,pertemuan di desa)

Berbagai faktor yang mempengaruhi masalah tersebut diantaranya:

a. Faktor Internal:

1. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang terbatas.
2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih terbatas baik dari aspek jumlah maupun kualitas.

b. Faktor Eksternal:

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
2. Masih adanya masyarakat yang mempunyai perilaku tidak sehat
3. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan Ikhtiar Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Dinas Kesehatan	1. Nilai Sakip Dinas Kesehatan	70
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Persentase ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100%
		2. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%
		3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir	100%
		4. Cakupan Kesehatan Pelayanan Balita Sesuai Standar	100%
		5. Persentase Anak Usia Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dasar	100%
		6. Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%
		7. Persentase Orang Usia 60 keatas yang mendapatkan	100%
		8. Persentase penderita hipertensi mendapatkan	100%

		Pelayanan Kesehatan sesuai standar	
		9. Persentase penderita DM mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%
		10. Persentase penderita ODGJ mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar	100%
		11. Persentase penderita TBC mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC sesuai standar	100%
		12. Persentase Orang bersesiko infeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi dini HIV sesuai standar	100%
		13. Rasio dokter terhadap Jumlah Penduduk	20%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.767.054.943 ,-	APBD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 197.780.454.912,-	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dayamanusia Kesehatan	Rp. 1.442.271.200 ,-	APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 469.110.000 ,-	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 356.820.000,-	APBD
TOTAL		Rp. 245.815.711.055,-	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip *good governance* dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN	KODE
	REALISASI KINERJA	REALISASI KINERJA	
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2021

No	Indikator	Kondisi Awal	2021		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	70	70	70.34	70.34
2.	Persentase ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	82.16	82.16
3.	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	100%	92.7	92.7
4.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Bayi	100%	100%	103.39	103.39
5.	Cakupan Kesehatan Pelayanan Balita Sesuai Standar	100%	100%	67.7	67.7
6.	Persentase Anak Usia Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	147.70	147.70

7.	Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining Kesehatan	100%	100%	40.10	40.10
8.	Persentase Orang Usia 60 keatas yang mendapatkan Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar	100%	100%	64.74	64.74
9.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan Pelayanan	100%	100%	18.03	18.03
10.	Persentase penderita DM mendapatkan Pelayanan	100%	100%	129	129
11.	Persentase penderita ODGJ mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar	100%	100%	87.94	87.94
12.	Persentase penderita TBC mendapatkan Pelayanan	100%	100%	32.24	32.24
13.	Persentase Orang bersesiko infeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi dini HIV	100%	100%	74.37	74.37
14.	Rasio dokter terhadap Jumlah Penduduk	18.2 %	20%	0.34	1.70

Dari 14 Jumlah indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan pada tahun 2021, 4 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Sedangkan 10 indikator kinerja sasaran yang lainnya belum capaian target. Untuk sejumlah target IKU DINAS KESEHATAN yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2021, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 3 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 4 indikator menunjukkan capaian yang tinggi, 2 indikator kriteria penilaian sedang dan 5 indikator yang capaiannya sangat rendah.

- Perbandingan Target dan Realisasi tahun ini

No	Indikator	Kondisi	2021
----	-----------	---------	------

		Awal	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	70	70	70.34	70.34
2.	Persentase ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	82.16	82.16
3.	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	100	100%	92.7	92.7
4.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Bayi	100%	100%	103.39	103.39
5.	Cakupan Kesehatan Pelayanan Balita Sesuai Standar	100%	100%	67.7	67.7
6.	Persentase Anak Usia Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	147.70	147.70
7.	Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining Kesehatan	100%	100%	40.10	40.10
8.	Persentase Orang Usia 60 keatas yang mendapatkan	100%	100%	64.74	64.74
9.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan Pelayanan	100%	100%	18.03	18.03
10.	Persentase penderita DM mendapatkan Pelayanan	100%	100%	129	129
11.	Persentase penderita ODGJ mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar	100%	100%	87.94	87.94
12.	Persentase penderita TBC mendapatkan Pelayanan	100%	100%	32.24	32.24
13.	Persentase Orang bersesiko infeksi HIV mendapatkan	100%	100%	74.37	74.37
14.	Rasio dokter terhadap Jumlah Penduduk	18.2 %	20%	0.34	1.70

- Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Perbandingan Capaian
----	---------	-----------	--------	----------------------

		Kinerja		2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Dinas Kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Angka	66,51	70,34	70,34
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	95.1	90.79	82.16
		Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	49.24	92.7
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir	%	104	98.9	103.39
		Cakupan Kesehatan Pelayanan Balita Sesuai Standar	%	58.7	44.3	67.7
		Persentase Anak Usia Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dasar	%	87.8	21.7	147.70
		Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	21.59	100	40.10
		Persentase Orang Usia 60 keatas yang mendapatkan	%	100	69,9	64.74
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	12.45	6.81	18.03
		Persentase penderita DM mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	98.17	60.25	129
		Persentase penderita ODGJ mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai	%	68.63	79.24	87.94

	standar				
	Persentase penderita TBC mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC sesuai standar	%	68.63	79.24	32.24
	Persentase Orang bersesiko infeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi dini HIV sesuai standar	%	163.95	4.87	74.37
	Rasio dokter terhadap Jumlah Penduduk	%	17.2	18.2	1.70

- Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2021 terhadap 2023(%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	70	70	70.34	70.34	70	82.16
2.	Persentase ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	82.16	82.16	100%	92.70
3.	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100	100%	92.7	92.7	100%	103.39
4.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Bayi	100%	100%	103.39	103.39	100%	67.70
5.	Cakupan Kesehatan Pelayanan Balita Sesuai Standar	100%	100%	67.7	67.7	100%	147.70
6.	Persentase Anak Usia Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	147.70	147.70	100%	40.10
7.	Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining	100%	100%	40.10	40.10	100%	18.03
8.	Persentase Orang Usia 60 keatas yang mendapatkan	100%	100%	64.74	64.74	100%	64.74

9.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	18.03	18.03	100%	129.00
10.	Persentase penderita DM mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	129	129	100%	87.94
11.	Persentase penderita ODGJ mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar	100%	100%	87.94	87.94	100%	32.24
12.	Persentase penderita TBC mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	32.24	32.24	100%	74.37
13.	Persentase Orang beresiko infeksi HIV mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	74.37	74.37	100%	7.73
14.	Rasio dokter terhadap Jumlah Penduduk	18.2 %	20%	0.34	1.72	22%	82.16

- Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional IKU

Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2021 terhadap 2023(%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	70	70	70.34	100.5	70	100.5
2.	Angka Kematian Ibu	92 Angka	74	387	19.1	68,71	17.8
3.	Angka Kematian Bayi	3.7 Angka	14	5.5	254.5	16	290.9
4.	Angka Kesembuhan penderita TB BTA +	61,8 %	59,3 %	59.3	100	23,1	257
5.	Prevalensi Balita Stunting	25%	21.1%	8.68	41.1	20%	43
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kesehatan	56,34%	80%	81.46	101.8	B = (76,61 - 88,30)	106
7.	Rasio Puskesmas Per satuan Penduduk	94%	94%	0.06	0.1	97%	0.06
8.	Rasio Posyandu Persatuan Balita	100%	100%	1.07	107	100%	1.07

9.	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	58%	39%	100	100	58%	172.4
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-------

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Nilai Sakip Dinas Kesehatan : Salah satu indikator penilaian pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah Nilai Sakip Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memperoleh nilai sebesar 70.34 kategori “BB” dengan interpretasi *“Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal”*. Dimana nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Kesehatan Kab. Sinjai.
2. Persentase ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan dari target 100% capaian 82.16% di tahun 2021 hal ini disebabkan karena ibu terlambat memeriksakan kehamilan (k1 akses) dan ibu hamil pindah ke daerah lain sehingga tidak tercakup dalam pemeriksa k4.
3. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan tahun 2021 tidak mencapai target 100% dengan capaian 92.70% karena masih adanya persalinan di non fasyankes.
4. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Bayi sesuai standar telah melebihi target di tahun 2021 dengan capaian 103.39% hal ini dikarenakan oleh hampir semua persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sehingga pemantauannya lebih maksimal.
5. Cakupan Kesehatan Pelayanan Balita Sesuai Standar capaiannya 67.70% dari target 100% dengan factor yang menjadi penghambat antara lain ibu yang anaknya berusia diatas 1 tahun sudah tidak rutin membawa anaknya ke posyandu serta masih adanya wabah pandemic Covid-19 ada sebagian ibu yang takut membawa anaknya ke posyandu.
6. Persentase Anak Usia Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan target tahun 2021, 100% capaian 147.70%. Semua anak usia Sekolah Dasar telah dilaksanakan pelayanan penjangkaran sehingga capaian dapat melebihi target.
7. Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan Skrining, target 100% capaian 40.10%. capaian masih rendah Karen Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke posbindu dan puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Selain itu

upaya promosi dari petugas kesehatan tentang pentingnya deteksi dini juga masih kurang.

8. Persentase Orang Usia 60 keatas yang mendapatkan target 100% capaian 64.74%. Belum mencapai target karena beberapa factor antara lain factor jarak rumah dengan lokasi posyandu lansia dengan kondisi fisik yang lemah mengakibatkan lansia sulit untuk menjangkau posyandu yang jaraknya jauh, factor kurangnya sarana atau tempat pelayanan posyandu, factor ketersediaan alat penunjang pelaksanaan posyandu, factor dukungan keluarga, factor ekonomi dan penghasilan dimana lansia membutuhkan pengeluaran yang lebih untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk memeriksakan kesehatannya, serta factor lansia yang takut berkunjung dengan alasan khawatir menjadi sasaran vaksinasi.
9. Persentase penderita hipertensi mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar, target 100% realisasi 18.03% pada tahun 2021 belum mencapai target dikarenakan kunjungan penderita hipertensi ke faskes masih rendah. Penderita hipertensi yang ditemukan di posbindu tidak datang ketika dirujuk ke puskesmas untuk memperoleh diagnose dan pengobatan karena mereka belum merasakan gejala. Sementara untuk indicator SPM harus di diagnose oleh dokter dan mendapatkan pengobatan.
10. Persentase penderita DM mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar target 100% capaian 129% hal ini disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya di sarana kesehatan.
11. Persentase penderita ODGJ mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar target 100% capaian 87.94% pada tahun 2021. Tidak mencapai target disebabkan penemuan kasus di puskesmas kurang dan masih adanya keluarga yang menutupi kasus ODGJ dalam lingkungan keluarganya.
12. Persentase penderita TBC mendapatkan Pelayanan capaian tahun 2021 sebesar 32.24% dengan target 100%. Hal ini belum mencapai target disebabkan oleh stigma negative terhadap penderita TB, masyarakat enggan ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa keadaannya karena takut jadi sasaran vaksin, deteksi dini dan pelacakan kontak tidak maksimal karena adanya wabah pandemic covid-19
13. Persentase Orang bersesiko infeksi HIV tahun 2021 mendapatkan capaian 74.27% dari target 100%, belum mencapai target karena masih adanya sasaran yang belum terlayani akibat terbatasnya reagen.
14. Rasio dokter terhadap Jumlah Penduduk, target tahun 2021 20% capaian 0.34% hal ini disebabkan oleh masih rendahnya jumlah dokter terhadap jumlah penduduk Kab. Sinjai tahun 2021. Dimana jumlah penduduk Kab. Sinjai tahun 2021 sebanyak 270786 jiwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai berbanding

dengan 93 orang jumlah Dokter di Kab. Sinjai sehingga rasio antara dokter dengan masyarakat itu memang masih kurang.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar Rp. 203.122.424.899,- anggaran Perubahan Rp. 245.815.711.055 dan realisasi Rp. 222.514.981.904,56,- atau 90.52 %

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
11. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D Dn Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
12. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

13. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
15. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
16. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota
17. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

A. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 90,52 % dari total anggaran yang dialokasikan dapat dilihat dari realisasi anggaran per sasaran pada tabel dibawah ini:

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 45.767.054.943 ,-	Rp. 44.884.669.121,-	98%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.403.000	178.402.700	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.898.452.043	42.340.668.089	98.70%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.100.000	214.762.500	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.654.000	260.618.971	64.09%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		939.760.393	90.35%

	Pemerintah Daerah	1.040.140.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.657.220	966.470.627	93.05%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.648.680	193.648.341	96.99%
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.197.780.454.912,-	Rp.175.723.632.463.56,-	88.84%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.890.306.785	72.831.647.159.56	97.25%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.254.848.327	102.311.245.404	83.69 %
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	582.000.000	531.245.100	91.28%
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D Dn Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	53.299.800	49.494.800	92.86%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 1.442.271.200,-	1.343.174.120	93.12%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.404.000.000	1.307.250.000	93.11%

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.271.200	35.924.120	93.87%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	469.110.000	374.131.200	79.75%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	49.250.000	48.000.000	97.46%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	419.860.000	326.131.200	77.68%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	356.820.000	189.375.000	53.07%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota	115.160.000	58.345.000	50.66%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	241.660.000	131.030.000	54.22%
TOTAL	Rp. 245.815.711.055 ,-	Rp. 222.514.981.904.56 ,-	90.52%

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai telah memperlihatkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator secara umum menunjukkan kinerja yang masih belum maksimal.
2. Dari 14 indikator sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja dari indikator sasaran tersebut sebanyak 3 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 4 indikator menunjukkan capaian yang tinggi, 2 indikator kriteria penilaian sedang dan 5 indikator yang capaiannya sangat rendah.
3. Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian sasaran antara lain disebabkan adanya pandemic Covid-19 sehingga keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/kegiatan, baik dalam hal Perencanaan dan Penganggaran (Planning and Budgeting), pencatatan/pelaporan, monitoring dan evaluasi, maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan dengan maksimal, padahal beberapa indikator sasaran yang harus dipenuhi dari kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dari capaian kinerja, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih efektif dan efisien dalam pencapaian program kerja untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja dan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
2. Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Peningkatan sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan baik bagi tenaga yang ada di Dinas Kesehatan dan UPTD , dan pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program di Puskesmas.
4. Diharapkan tahun–tahun berikutnya efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan sebaiknya menjadi perhatian bersama sehingga dalam penganggaran dapat dilaksanakan lebih proporsional.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

Penghargaan/Prestasi yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun dan Memakai Masker di Lokasi Terbanyak



2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus



3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

